

## BAB V

### PENUTUP

#### V.1 Kesimpulan

Hubungan Pakistan-Tiongkok selama beberapa dekade terus berkembang hingga memasuki fase strategis dan kompleks, terutama di bawah payung CPEC. proyek CPEC ini tidak hanya berupa pembangunan infrastruktur ataupun investasi ekonomi, namun juga mendorong keterikatan Pakistan terhadap Tiongkok dari segi keuangan, politik, hingga militer. Investasi Tiongkok yang telah menjadi tulang punggung pembangunan masif Pakistan selanjutnya membentuk interdependensi struktural yang secara tak langsung menciptakan banyak limitasi bagi Pakistan—sebagai negara penerima—untuk memiliki posisi independen tanpa harus mendukung Tiongkok, meskipun dalam isu yang kontroversial. Ketidakhadiran Pakistan menyumbang dukungan suara terhadap Muslim Uighur tak lagi dapat dilihat sebagai kebetulan diplomatik, melainkan telah menyangkut struktur hubungan yang timpang antara negara pinggiran dengan negara pusat sebagaimana dijelaskan dalam teori dependensi ekonomi.

Tekanan yang dialami Pakistan juga semakin nyata terjadinya pola dependensi ekonomi dengan membuktikan bahwa negara pinggiran cenderung mengikuti kepentingan negara pusat. Keterikatan berupa investasi, kredit, teknologi, dan perdagangan mampu membatasi Pakistan memberikan manuver dan mengekspresikan gagasan solidaritas Muslim dalam isu Uighur. Dengan demikian, terjadi paradoks politik luar negeri Pakistan yang di satu sisi memiliki citra pembela umat Muslim, seperti dalam kasus Palestina dan Azerbaijan, namun di sisi lain, juga memilih diam terhadap penindasan yang menimpa Muslim Uighur. Ketidakselarasan ini menunjukkan kerasnya tekanan struktural yang diawali dari ketergantungan ekonomi dengan kepentingan nasional yang memiliki definisi baru dalam lensa investasi dan utang luar negeri. Sikap Pakistan yang tidak konsisten menanggapi isu Muslim global melemahkan kredibilitas negara

tersebut dalam isu yang berkaitan dengan HAM dan menjadikannya sebagai aktor oportunistis yang pragmatis. Hal tersebut tidak hanya mempengaruhi reputasi internasional saja, namun juga menimbulkan tanda tanya besar terhadap moralitas diplomasi Islam yang selama ini diklaim menjadi landasan identitas Pakistan.

Berdasarkan temuan dan paparan analisis di atas, disimpulkan bahwa kerja sama ekonomi Pakistan-Tiongkok melalui kerangka CPEC memiliki dampak signifikan terhadap kebijakan luar negeri Pakistan dalam isu Uighur. Interdependensi ekonomi yang mendalam telah membentuk pola hubungan asimetris yang menjadikan posisi Pakistan tertekan untuk bersikap pasif, bahkan terkesan berada dalam posisi Tiongkok. Oleh karena itu, isu Uighur dapat dilihat lebih dari persoalan hak asasi manusia, namun juga refleksi dari bagaimana kekuasaan global dan ekonomi-politik mampu membentuk sikap negara dalam ranah moral etis dan kemanusiaan.

## **V.2 Saran**

### **V.2.1 Saran Praktis**

Pemerintah Pakistan perlu mengambil langkah konkret sebagai upaya mengurangi ketergantungan ekonomi berlebihan terhadap Tiongkok. Hal ini dapat dilakukan melalui diversifikasi mitra dagang dan investor asing dengan penguatan ekonomi bersama negara regional lainnya, seperti Turki, Arab Saudi, dan negara-negara ASEAN, atau memperluas kerja sama dengan lembaga multilateral non-Tiongkok, seperti Asian Development Bank (ADB) atau Islamic Development Bank (IsDB). Selain itu, Pakistan juga harus lebih memperhatikan sektor manufaktur dan industri demi menjaga kompetisi pasar global tanpa harus bergantung pada bantuan modal energi dari negara lain. Langkah mengurangi ketergantungan ini akan membuat Pakistan semakin memiliki ruang kebijakan yang lebih fleksibel untuk menentukan posisi secara independen dalam isu-isu internasional, khususnya yang menyangkut hak asasi manusia dan solidaritas Muslim.

## V.2.2 Saran Akademis

Penelitian ini membuka keberlanjutan diskursus dan kajian yang menyoroti relasi geopolitik dan sikap negara dalam isu hak asasi manusia, khususnya dalam perspektif *Global South*. Sehingga disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan studi perbandingan dengan negara-negara berkembang lainnya yang juga bergantung secara ekonomi dengan Tiongkok, seperti Sri Lanka atau negara-negara di Afrika Sub-Sahara. Kajian ini juga dapat dipelajari secara komprehensif menggunakan pendekatan interdisipliner dengan menggabungkan teori dependensi ekonomi dengan studi Islam politik. Tujuannya adalah untuk memahami lebih lanjut bagaimana identitas keagamaan mampu dinegosiasikan dalam praktik diplomasi negara-negara Muslim yang berada di bawah pengaruh investasi Tiongkok.